

MENELISIK PERAN GURU DALAM PEMBUMIHAN NASIONALISME AWAL ABAD XX

Romadi✉

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Mei 2018

Disetujui Juni 2018

Dipublikasikan Juli 2018

Keywords:

roles, teachers, nationalism.

Abstrak

Guru mempunyai peran sebagai penggerak dan pendorong perubahan masyarakat, karena guru mempunyai intelektualitas dan kesadaran yang tinggi, serta mempunyai posisi yang "agung" sepanjang jaman. Pada awal abad XX, guru mempunyai peran membangkitkan kesadaran masyarakat akan nasib bangsanya, dengan metode dan pendekatan yang diterapkan dalam proses pembelajaran, maupun tulisan-tulisannya. Guru berperan "menyemai nasionalisme" bangsa, baik melalui proses pembelajaran maupun tulisan-tulisannya. Willem Iskandar seorang guru dari Tapanuli, dalam surat kabar *De Locomotief* yang terbit di Semarang disebutkan sebagai pionir pendidikan Bumi Putera menjalin komunikasi dengan teman-teman sejawat sesama guru dari etnis lain untuk memikirkan kemajuan bangsanya. Sementara itu, Ki Hajar Dewantara ingin memadukan antara pendidikan Timur yang lebih menekankan aspek spiritual dengan pendidikan Barat yang menekankan aspek akademik. *Pastor Van Rijkvorsel*, guru berkebangsaan Belanda, pada 1926 mementaskan cerita kepahlawanan Pangeran Trunojoyo (*De opstand van Tarunodjojo*) di Muntilan, yang diperankan oleh murid-muridnya yang orang Indonesia. Dengan demikian, amat besar peran guru dalam membunikan semangat nasionalisme ke segenap lapisan masyarakat Indonesia.

Abstract

Teachers have a role as a motivator and a driver of change in society, because teachers have a high intellect and awareness, and have a "great" position throughout the ages. In the early twentieth century, teachers had a role to raise public awareness of the fate of their nation, with methods and approaches applied in the learning process, as well as their writings. Teachers play a role "menyemai nasionalisme" nation, both through the process of learning and his writings. Willem Iskandar a teacher from Tapanuli, in the newspaper De Locomotief published in Semarang mentioned as a pioneer of education Bumi Putera establish communication with fellow teachers of other ethnic teachers to think about the progress of the nation. In the meantime, Ki Hajar Dewantoro wants to combine Eastern education with more emphasis on spiritual aspect with Western education which emphasizes academic aspect. Father Van Rijkvorsel, a Dutch teacher, in 1926 performed the story of Prince Trunojoyo (De Opstand van Tarunodjojo) in Muntilan, played by his Indonesian students. Thus, the great role of teachers in membunikan spirit of nationalism to all levels of Indonesian society.

© 2018 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: sejarah@mail.unnes.ac.id

ISSN 2252-6633

PENDAHULUAN

Guru adalah komunitas penting dalam suatu bangsa, sepanjang sejarah bangsa itu. Guru berkaitan erat dengan pendidikan, di mana ada guru di situlah terjadi proses pendidikan, baik formal maupun non formal. Oleh sebab itu, guru mempunyai peran penting dalam berbagai kehidupan, sebagai penggerak dan pendorong perubahan masyarakat. Peran ini disebabkan guru mempunyai intelektualitas dan kesadaran yang tinggi, selain mempunyai posisi yang “agung” sepanjang jaman. Dalam perjalanan sejarah, guru mempunyai banyak sebutan, seperti *Ajar, Resi, Pendeta, Nujum, Sang Pamomong*, sampai dengan istilah-istilah yang dikenal sekarang, seperti ustadz, pamong, dan sebagainya.

Guru mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Daud Yusuf (Mendikbud RI 1978-1983), mengatakan bahwa guru mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi profesional, fungsi kemanusiaan, dan fungsi *civic mission*. Fungsi profesional berarti guru meneruskan ilmu/keterampilan/pengalaman yang dimiliki atau dipelajarinya kepada anak didiknya. Fungsi kemanusiaan berarti guru mengembangkan atau membina segala potensi atau bakat dan pembawaan yang ada pada anak serta membentuk wajah Ilahi dalam dirinya. Fungsi *civic mission* berarti guru wajib menjadikan anak didiknya menjadi warga negara yang baik, yaitu berjiwa patriotik, mempunyai semangat kebangsaan, dan disiplin (Marno, 2008: 18-19).

Dalam perjuangan bangsa Indonesia, guru mempunyai peran yang tidak sedikit, baik secara perorangan atau kelembagaan. Di awal pergerakan nasional, guru mempunyai peran membangkitkan kesadaran masyarakat akan nasib bangsanya, dengan metode dan pendekatan yang diterapkannya dalam proses pembelajaran. Tak bisa disangkal, bahwa guru berperan “menyemaikan nasionalisme” bangsa ke segenap lapisan masyarakat dari berbagai pelosok negeri.

Kedudukan penting guru dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa dapat dilihat dari adanya ajaran “*sembah yang lima*” yakni kepada siapa sembah itu patut ditujukan.

Pertama, sembah ditujukan kepada Sang Maha Pencipta, karena Dia-lah yang menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. *Kedua*, sembah ditujukan kepada kedua orang tua, karena orang tualah yang menjadi perantara, mengapa kita sampai maujud di dunia ini. *Ketiga*, sembah ditujukan kepada guru, karena sang gurulah yang membuka jalan bagi kita untuk menempuh jalan hidup ini. *Keempat*, sembah ditujukan kepada raja, karena rajalah yang memberi pengayoman dan perlindungan selama kita hidup. Raja dalam hal ini sama dengan negara. *Kelima*, sembah ditujukan kepada saudara tua, karena saudara tualah yang dianggap sebagai pengganti kedua orang tua, apabila mereka sudah tiada (Soebagijo, 1981: 11). Sesuai dengan kedudukan pentingnya guru, maka wajar saja apabila guru mempunyai peran dalam menebarkan nasionalisme. Masyarakat semakin percaya, apabila segala sesuatu disampaikan oleh guru, karena posisi guru adalah pelita hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu, sebagian besar tokoh pergerakan nasional di awal abad XX sekaligus sebagai seorang guru, yang berperan menggerakkan masyarakat dengan menanamkan semangat nasionalisme. Pada permulaan abad XX itu, fajar baru menyingsing di ufuk nusantara. Mulai bermunculan pergerakan-pergerakan nasional, baik yang bersifat lokal maupun nasional menuntut terusirnya penjajahan dan kembalinya kemerdekaan bangsa (Stoddard, 1966: 286).

Nasionalisme, menurut Stoddard (1966) adalah suatu keadaan jiwa (*a state of mind*) berupa kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar manusia di suatu wilayah tertentu, sehingga mereka mempunyai perasaan kebangsaan, yaitu rasa kebersamaan segolongan (*a sense of belonging together*) sebagai suatu bangsa (Stoddard, 1966: 131). Sementara itu, nasionalisme menurut Kohn, adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan, perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda (Kohn,

1984: 11). Sementara itu, bangsa adalah buah hasil tenaga hidup dalam sejarah, dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah membeku. Bangsa-bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tak terumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa-bangsa itu memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membuat mereka itu berbeda-beda dari bangsa-bangsa lainnya, misalnya persamaan keturunan, bahasa, daerah, kekuatan politik, adat istiadat dan tradisi, atau perasaan agama. Akan tetapi tidak ada satupun faktor-faktor ini yang bersifat hakiki untuk menentukan ada tidaknya atau untuk merumuskan bangsa itu (Kohn, 1984: 12).

Pemahaman tentang bangsa yang dikembangkan oleh Hans Kohn pada saat ini sangat berbahaya karena berkaitan dengan faktor etnis dan perbedaan lainnya yang memungkinkan muncul menjadi sebuah bangsa baru. Gejala di Afrika dan Eropa menunjukkan bahwa kecenderungan sebuah bangsa yang mempunyai persamaan-persamaan tertentu ingin membentuk negara sendiri.

Nasionalisme menurut Tom Nairn justru disebut sebagai patologi sejarah pembangunan modern, tak bisa dielakkan sama seperti neurosis dalam sesosok pribadi, lengkap dengan kemenduan asasi yang melekat padanya, dengan kemampuan yang sudah dari “sononya” untuk anjlok ke kegilaan, berakar pada dilema-dilema ketidakberdayaan yang disorongkan ke hadapan sebagian besar jagat raya ini (mirip dengan infantilisme bagi masyarakat-masyarakat) dan pada umumnya tak mungkin disembuhkan (Anderson, 1992: 7). Bahkan Ernest Gellner mengatakan bahwa nasionalisme bukanlah bangkitnya kesadaran diri suatu bangsa, nasionalisme mem-*bikin-bikin* bangsa-bangsa di mana mereka tidak ada (Anderson, 1992: 9).

Apabila melihat gejala di Indonesia, rasanya pendapat Ernest Renan tentang nasionalisme lebih dapat diterima. Ernest Renan berpendapat bahwa nasionalisme adalah kesepakatan dan kemauan suatu masyarakat untuk bersatu mencapai tujuannya. Dengan demikian untuk kasus di Indonesia, nampaknya pendapat ini lebih layak diterima. Sedangkan mengenai pengertian suatu bangsa, Anderson

menawarkan sebuah pengertian bahwa bangsa atau *nation* adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil; sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula mendengar tentang mereka. Namun toh di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka (Anderson, 1992: 8).

Kesadaran diri masyarakat Indonesia diawal abad XX, merupakan kesadaran kolektif yang digerakkan oleh kekuatan baik berasal dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri maupun pengaruh-pengaruh luar. Gabungan kekuatan keduanya yang akhirnya menjelma menjadi gerakan nasionalisme bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan nasionalisme, yaitu tercapainya kemerdekaan, Bung Karno, pada 1928 mengemukakan adanya “Trilogi Nasionalisme”, yaitu *nationale geest*, *nationale wil*, dan *nationale daad* (roh dan semangat nasional, kemauan nasional, dan perbuatan nasional), bahkan dapat ditambahkan *nationale denken* (berpikir nasional) sebagai dasar tumbuhnya semangat nasional (Sunario, 1972: 39).

Kapan dimulainya nasionalisme Indonesia tidak dapat disebutkan atau diperkirakan secara tepat. Ini merupakan suatu fase yang baru mulai disebut-sebut dengan jelas dan terorganisir pada masa dasa warsa kedua abad XX, namun kebanyakan unsur pokoknya yang penting sudah ada jauh sebelumnya, mungkin bahkan sudah ada pada periode tatkala dampak pemerintahan Belanda mulai dirasakan. Dapat pula diperdebatkan bahwa sejak itu nasionalisme-nasionalisme laten yang bersifat embrio, telah ada di dalam masyarakat-masyarakat inti Indonesia, dan bahwa pengejawantahan aktifnya telah begitu lama terkandung-katung, terutama karena tidak adanya kepemimpinan (Kahin, 1995: 54).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian konseptual, dan menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari heuristik (pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber primer, yaitu buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan tema.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Awal Berdirinya Lembaga Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia sebenarnya telah ada sejak munculnya kelompok-kelompok masyarakat. Keluarga bangsawan di kerajaan-kerajaan mempunyai “semacam guru” untuk bertugas mempersiapkan kaderisasi bagi generasi mudanya, namun guru-guru ini sifatnya terbatas dan *privat*. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan yang relatif terbuka berupa *padepokan-padepokan* yang didirikan oleh para *resi* atau *pendeta*. Ketika pengaruh asing masuk (khususnya India dan Islam) lembaga-lembaga tradisional semakin berkembang. Namun demikian masih bersifat terbatas untuk golongan tertentu..

Sebetulnya sejak abad ke-17 di sana sini di daerah-daerah *direct rule* telah diciptakan sistem sekolah Barat oleh pihak Belanda. Namun sistem pendidikan dalam abad ke-17 yang hanya sedikit sekali jumlahnya, sangat berkaitan erat dengan agama Kristen. Pada zaman itu sistem pendidikan memang hanya merupakan alat penyebaran agama. Kemudian pada abad ke-19 karena dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran rasional, pendidikan yang bersifat keduniaan dipisahkan dari pendidikan agama. Sistem pendidikan yang mulai dibangun di beberapa tempat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku lebih menekankan hal-hal rasional yang berhubungan dengan kehidupan duniawi.

elain itu, sistem sekolah mula-mula hanya diciptakan untuk masyarakat Eropa di kota-kota besar di Indonesia itu, mulai juga dibuka untuk anak-anak priyayi. Jumlah murid

yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan kelompok etnis makin bertambah karena dibukanya sekolah-sekolah umum oleh berbagai misi, zending, dan golongan. Pada 1892 sudah mulai diadakan sistematisasi dalam sistem pendidikan yang berbeda-beda dari satu pulau ke pulau lainnya. Pada waktu itu semua sekolah dasar dikelompokkan menjadi dua macam saja. *Pertama*, dinamakan *Eerste School* (Sekolah Angka Satu). Sekolah ini hanya menampung murid-murid dari golongan priyayi dan hanya didirikan di ibukota karesidenan. Lama pendidikannya adalah lima tahun, kurikulumnya meliputi membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, menggambar, Ilmu alam dan ilmu ukur tanah. Pada mulanya bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah, tetapi pada tahun 1907 diubah menjadi bahasa Belanda dan lama pendidikannya menjadi enam tahun.

Jenis sekolah *kedua*, yang didirikan tahun 1892 adalah *Tweede School* (Sekolah Angka Dua). Sistem sekolah ini ditujukan pada rakyat umumnya di daerah pedesaan. Lama pendidikan hanya tiga tahun dan kurikulumnya hanya terdiri dari menulis, membaca dan berhitung. Bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah setempat, atau bila tidak ada bahasa daerah maka bahasa Melayu yang dipakai.

Selain itu, ada beberapa sekolah kejuruan yang didirikan sebelum Politik Etika diterapkan tahun 1901 yaitu Sekolah Pertanian sudah didirikan sebelum abad XX tetapi hanya untuk mencetak tenaga-tenaga rendahan saja. Pada tahun 1876 pernah didirikan *Landbouwschool* (Sekolah Pertanian) yang dimasuki putra-putra dari golongan priyayi. Tetapi sekolah ini ditutup pada tahun 1884, dan baru dibuka kembali setelah Politik Etika diterapkan. Bahkan cikal bakal STOVIA adalah *Sekolah Dokter Jawa* yang didirikan tahun 1851 dengan lama pendidikan dua tahun. Pada tahun 1875 lama pendidikan meningkat menjadi enam tahun dan barulah tahun 1902 ditingkatkan menjadi STOVIA.

Selain pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda maupun masyarakat Indonesia yang bercorak modern, di masyarakat Jawa terdapat pendidikan yang khas, yaitu pendidikan *pesantren* dan pendidikan

padepokan. Dalam pesantren para santri belajar ilmu-ilmu agama seperti membaca Al Qur'an sedangkan di padepokan murid belajar ilmu *kanuragan*, seperti berbagai macam kesaktian. Di samping itu tampaknya ada juga kepercayaan bahwa puncak-puncak kepandaian hanya dapat diperoleh melalui *pulung*, yaitu anugerah yang istimewa. Menurunnya sistem padepokan ini adalah akibat masuknya sistem pemasaran kerja baru yang mencari tenaga pengajar terlatih di pamong praja dan pabrik-pabrik. Sementara itu sistem pesantren sebagai lembaga yang mengelola pendidikan agama masih tetap bertahan, tanpa pengaruh oleh pemasaran kerja (Kuntowijoyo, 2003: 25-26). Kedua jenis pendidikan khas Jawa ini akhirnya membaaur bersama dengan lembaga-lembaga pendidikan baru baik yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda maupun organisasi-organisasi dan golongan etnis.

Ketika Politik Etika diterapkan, sekolah-sekolah Angka Dua dirubah menjadi Sekolah Desa mulai tahun 1907. Sekolah ini didirikan di daerah pedesaan dan masyarakat desa diberi tanggungjawab dalam pembinaannya berupa pendirian dan pemeliharaan gedung sekolahnya. Pembinaanya tidak pada Departemen Pendidikan tetapi Departemen Dalam Negeri.

Selanjutnya pada tahun 1914, Pemerintah Kolonial Belanda merubah Sekolah Angka Satu menjadi *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) yang berbahasa Belanda. Sebagai lanjutan dari HIS, maka lulusannya ditampung di Sekolah Lanjutan yang disebut *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). Lama pendidikannya tiga tahun. Selain itu juga didirikan *Vervolgschool* untuk menampung lulusan Sekolah Desa. Lama pendidikan ini lima tahun dan bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Sedangkan sekolah Lanjutan Atas untuk menampung lulusan MULO adalah *Algemeen Middelbaare School* (AMS). AMS pertama didirikan di Yogya dengan kurikulum B (Pasti Alam), kemudian menyusul Bandung dengan kurikulum A1 (Sastra Barat), dan di Surabaya dengan kurikulum A2 (Sastra Timur) (Leirissa, tt: 25-26).

Guru Penebar Semangat Nasionalisme

Dalam sejarah Indonesia peran guru sebagai penyebar semangat nasionalisme dapat dilihat dari berbagai momen tertentu yang melibatkan guru. Willem Iskandar seorang guru dari Tapanuli pada akhir abad XIX merupakan tokoh *Bumi Putera* yang mengembangkan pendidikan untuk masa depan bangsanya. Kepeloporannya tidak hanya dikenal di tanah Batak, tetapi menyebar ke daerah-daerah lain, termasuk Semarang. Dalam surat kabar *De Locomotief* yang terbit di Semarang bulan Agustus 1876 disebutkan bahwa almarhum Willem Iskandar merupakan sosok guru, pionir pendidikan *Bumi Putera*. Dalam suasana bangsa terjajah, Willem Iskandar menjalin komunikasi dengan teman-teman sejawat sesama guru dari etnis lain untuk memikirkan kemajuan bangsanya. Perhatiannya terhadap pendidikan yang begitu besar, ia mengajukan usul kepada Pemerintah Kolonial Belanda agar diadakan peningkatan mutu terhadap sekolah-sekolah *Bumi Putera*, salah satunya adalah pemberian beasiswa kepada guru-guru muda. Berkat usahanya yang gigih, sejumlah guru *Bumi Putera* dari beberapa etnis, yaitu Banas Lubis (Batak Mandailing), Raden Mas Surono (Surakarta/Jawa) dan Ardi Sasmita (Sunda) berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke Belanda (www. Mandailing. Org, dalam Wasino, 2006: 15).

Pada akhir abad XIX, banyak tokoh Islam yang mendirikan lembaga pendidikan Islam modern. Syeh Muhammad Djamil Djambek yang pulang ke Minangkabau dari Mekah pada 1903, dan Haji Abdul Karim Amrullah pada 1906 adalah muslim modernis yang mendirikan sekolah Adabiyah di Padang, dan sekolah Thawalib di Padangpanjang. Semakin tahun, sekolah makin berkembang, baik kurikulum maupun fasilitasnya, sehingga kelompok Islam modern menerbitkan surat kabar dua mingguan bernama *al-Munir*, yang merupakan jurnal Islam modern pertama di Indonesia (Ricklefs, 2001: 354-355). Untuk mengadakan pengawasan terhadap lembaga pendidikan Islam yang makin berkembang, yang dianggap sebagai ancaman yang potensial, pemerintah kolonial Belanda pada 1905 mengeluarkan *goeroe ordonnantie*, yang

menyatakan bahwa sebelum pelajaran agama diberikan, harus ada ijin tertulis dari pemerintah, dan ada daftar muridnya. Selain mengatur guru-guru di lembaga pendidikan Islam, *goeroe ordonnantie* juga berlaku di semua jenis lembaga pendidikan di seluruh Indonesia sejak 1925 (Ricklefs, 2001: 369).

Di Jawa banyak guru yang menjadi pionir pergerakan nasional, salah satunya Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mendirikan organisasi Taman Siswa, dia sempat mendirikan organisasi *Indische Partij* yang bergerak dalam bidang politik. Sejak kembali dari pengasingannya di negeri Belanda, Ki Hajar Dewantoro mendirikan organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan yaitu Perguruan Taman Siswa.

Ki Hajar Dewantoro ingin memadukan antara pendidikan Timur yang lebih menekankan aspek spiritual dengan pendidikan Barat yang menekankan aspek akademik. Sebutan dirinya sebagai Ki Hajar sudah menunjukkan bahwa ia mengambil konsep dari tradisi orang Jawa. Sebagaimana tertuang dalam azas-azas pendidikan Taman Siswa, ia ingin mendidik manusia Indonesia “utuh” yang dapat hidup mandiri. Murid-murid didik agar dapat “berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka di dalam batas-batas tujuan mencapai tertib damai hidup bersama”. Guru tidak selayaknya memaksakan siswa harus menguasai semua tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh kurikulum, tetapi biarlah siswa belajar menurut kodrat alam. Sistem ini dalam dunia pendidikan dikenal dengan “Sistem Among”. Dalam sistem among, guru ideal digambarkan sebagai “tut wuri handayani”, selain juga harus memiliki karakter “ing ngarsa sung tuladha” dan “ing madya mangun karsa”. Menurut sejumlah pakar pendidikan sistem among ini ternyata merupakan salah satu model pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) yang dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Wasino, 2006: 16).

Ki Hajar Dewantoro ternyata membangun pendidikan tidak terlepas dari agendanya dalam membangun semangat kebangsaan atau nasionalisme Indonesia yang semula diperjuangkan melalui jalur politik yaitu *Indische Partij*. Dalam sebuah pernyataannya ia

mengatakan bahwa ada hubungan antara gerakan politik (kebangsaan) dengan pendidikan Taman Siswa. “Taman Siswa dan segala lapangan usaha sosialnya lainnya merupakan ladang atau sawah, di mana orang memupuk apa yang perlu bagi keperluan hidupnya. Gerakan politik merupakan pagar yang melindungi ladang dari gangguan binatang-binatang buas yang akan memakan dan menginjak-injak tunas-tunas tanaman” (Notosusanto, dkk, 1993: 244-350). Taman Siswa memadukan pendidikan gaya Eropa yang modern dengan seni-seni Jawa tradisional. Pada 1924, Taman Siswa menerima murid sampai tingkat MULO dan sekolah guru. Taman Siswa tidak menerapkan kurikulum pemerintah, tidak mau menerima subsidi pemerintah, dan lebih mengutamakan kebebasan (Ricklefs, 2001: 367). Sementara itu, KH. Akhmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sangat penting perannya dalam menanamkan semangat nasionalisme. Dia sangat giat dalam menggerakkan masyarakat untuk menginsafi perlu mutlaknya pendidikan, kemudian menyelenggarakannya untuk menyiapkan kader-kader bangsa bagi pembangunan di kemudian hari. Pemuda-pemuda harus dididik dengan pengetahuan umum yang luas dan mendalam, tetapi tidak melupakan pendidikan akhlak yang mendalam pula. Dengan pola pendidikan itu, akan tercipta manusia intelek yang bermoral agama (Stoddard, 1966: 299).

Peran lain juga ditunjukkan Tan Malaka yang lebih dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional berhaluan kiri, yang juga seorang guru. Semula dia merupakan guru pada sekolah yang diadakan oleh *Deli & Svembah Maatschappij*. Pada bulan Juni tahun 1921 dia bersama teman-temannya di organisasi Sarikat Islam (SI) di Semarang mendirikan sekolah dengan menggunakan ruang sidang gedung SI Semarang sebagai ruangan belajar. Murid pertamanya berjumlah 50 orang. Sekolah ini dihambat oleh Residen Semarang karena para gurunya dianggap berhaluan komunis yang dianggap membahayakan Pemerintah Kolonial Belanda dan pemilik modal di Semarang. Tan Malaka yang menjadi Kepala Sekolah tersebut kemudian

menggalang dana masyarakat sekitarnya dengan jalan masuk kampung ke luar kampung dengan baju putih dan berselempang merah bertuliskan *Rasa Kamardikan*. Walaupun Tan Malaka dianggap sebagai tokoh yang terlibat berbagai gerakan menentang pemerintah setelah merdeka, tetapi perannya sebelum kemerdekaan tidak dapat diabaikan.

Lain lagi kisah sebuah sekolah di Magelang, yaitu *Kweekschool* (Sekolah Guru). Sekolah ini bermaksud mengadakan peringatan berdirinya sekolah tersebut pada tahun 1926 dengan mengadakan pentas seni drama yang disebut *toneelstuk*. Anehnya cerita yang dipilih adalah cerita kepahlawanan Pangeran Trunojoyo (*De opstand van Tarunodjojo*). Cerita ini ditulis oleh guru dari sekolah Guru Katholik di Muntilan berkebangsaan Belanda bernama *Pastor Van Rijkevorsel*. Seluruh pemainnya adalah murid-murid sekolah guru itu, dan pelaku utama yaitu Pangeran Trunojoyo adalah Raden Sukotjo (ayah Prof. Dr. Umar Khayam) dan Pangeran Kajoran yang diperankan oleh Sudiro (pernah menjadi Walikota DKI dan Gubernur Sulawesi). Karena isinya berupa kisah kepahlawanan orang Bumi Putera, maka pementasan *tonil* tersebut dibatalkan oleh pemerintah (Soebagijo, 1981: 10-12).

Selain *Pastor Van Rijkevorsel*, seorang keturunan Belanda di Bandung pun mempunyai peran dalam membangkitkan semangat kebangsaan generasi muda Indonesia. Deuwes Dekker atau yang dikenal sebagai Dr. Danudirjo Setyabudi juga seorang guru. Dia bekerja sebagai guru pada sekolah swasta di Bandung tahun 1921 milik Ny. Meayer Elenbaas, setelah Indische Partij yang didirikan bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dibubarkan Pemerintah Kolonial Belanda. Dari sekolah ini selanjutnya muncullah *Preanger Instituut van de Vereeniging Volksonderwijs* (Lembaga Priangan dari Perhimpunan Guru-Guru Sekolah Rakyat), dan Deuwes Dekker berkedudukan sebagai Kepala Sekolah. Meskipun sekolah tersebut diawasi ketat oleh Pemerintah Kolonial Belanda, ia tetap mengobarkan semangat kebangsaan kepada murid-muridnya, salah satunya dengan

mengadakan peringatan wafatnya Pangeran Diponegoro tanggal 8 Januari 1924. Peristiwa ini jelas menunjukkan suatu simbol semangat kebangsaan karena Diponegoro dianggap sebagai tokoh pemberontak yang disegani oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada abad XIX (Notosusanto, dkk, 1993: 244-350). Deuwes Dekker berusaha menghilangkan apa yang dinamakan *inlanders neigingen*, yaitu kecenderungan-kecenderungan pribumi yang dianggapnya kurang baik, agar demikian bangsa Indonesia bisa tumbuh sebagai suatu bangsa yang mempunyai harga diri (Soebagijo, 1981: 52).

Sementara itu, di Sumatera juga muncul lembaga pendidikan Kayutanam. Lembaga ini dibangun oleh seorang guru yang berpandangan maju dan memiliki kaitan dengan pergerakan nasional yaitu Mohammad Syafei (1897-1969). Syafei menolak pendidikan model Barat yang ketika itu hanya menekankan kecakapan intelektual. Ia menginginkan anak didiknya menjadi murid ideal, yakni cinta kebenaran dalam hatinya, dan dalam pengetahuan intelektualnya (Notosusanto, 1993: 271).

Bung Karno pun merupakan seorang guru yang dianggap “penghasut kelas wahid”. Ketika dalam pengasingannya di Bengkulu, Bung Karno mengajar murid-muridnya, bahkan berhasil mementaskan sebuah pertunjukan sandiwara dengan cerita “*Rainbow*” dan “*Dokter Syaitan*”. Pengarang dan sutradara dari kedua cerita itu adalah Bung Karno sendiri (Soebagijo, 1981: 61). Sebelum menjadi guru di Bengkulu, Bung Karno sudah menjadi guru di Perguruan Taman Siswa di Bandung, bersama Mr. Sunario. Mr. A. Jonkman yang mengunjungi sekolah tersebut pada 1927, mengatakan bahwa sekolah itu bercorak nasional Indonesia. Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, namun Mr. Sunario yang menjadi pengajar tata negara dan sejarah, lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bercorak Indonesia (Suhartono, 2001: 60).

Pengakuan tentang peran guru ditulis oleh Hardi dalam biografinya, “Sewaktu saya menjadi siswa MULO dan AMS di Semarang, dengan sendirinya saya memperoleh kesempatan dan memiliki kemampuan intelektual untuk membaca tulisan-tulisan dari para pemimpin

pergerakan, termasuk Bung Karno di berbagai surat kabar. Bahan-bahan masukan itu memperluas cakrawala pandangan hidupku dan oleh karenanya juga meningkatkan kadar nasionalisme yang sedang berkembang dalam jiwaku. Saya sudah menyadari suatu pengertian yang prinsipil bahwa nasionalisme itu merupakan *conditio sine qua non* bagi perjuangan untuk mengusir pemerintah Hindia Belanda yang berwatak kolonial” (Hardi, 1983: 4). Pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa guru membahayakan kedudukan pemerintah, oleh karena itu pendirian sekolah dan ijin mengajar guru dipersulit.

Puncak kekerasan Belanda dalam menghadapi guru-guru yang selalu mengobarkan semangat kebangsaan adalah dikeluarkannya Ordonansi No. 494 tanggal 17 September 1932 yang mulai berlaku pada 1 Oktober 1932 yang lebih dikenal dengan sebutan *Wilde Scholen Ordonantie* suatu Undang-Undang Sekolah Liar. Garis besar isi ordonansi adalah:

1. Guru-guru terlebih dahulu harus minta ijin untuk mengajar.
2. Orang-orang yang akan menjadi guru harus terlebih dahulu mempunyai ijazah dari Sekolah Gubernur atau sekolah yang mendapat subsidi.
3. Meskipun sudah mendapat ijin menjadi guru, namun ijin tadi seaktu-waktu boleh dicabut lagi apabila ternyata guru itu dipandang berbahaya bagi ketenteraman umum.
4. Barangsiapa yang akan mendirikan sekolah harus terlebih dahulu minta ijin kepada *Hoofd van Plaatselijke Bestuur*, Kepala Pemerintahan setempat. Letak sekolah harus baik, rumah gedungnya harus bagus.
5. Kepala Negeri berhak menutup sekolah-sekolah itu, apabila bertentangan dengan kepentingan umum.
6. Kalau guru-guru ada yang bertindak bertentangan dengan isi ordonansi dapat didenda F1 25,- (dua puluh lima gulden) dan bila tidak dapat membayar denda, dibui delapan hari.

Tepat pada 1 Oktober 1932 yaitu pada tanggal berlakunya ordonansi itu, Ki Hajar Dewantoro mengirim surat kawat kepada Gubernur Jenderal di Bogor yang menegaskan bahwa tindakan pemerintah dengan mengadakan ordonansi tersebut ‘seolah-olah membuktikan kebingungan dan kegetaran Pemerintah”, dan selanjutnya memperingatkan “bahwa walaupun makhluk yang tidak berdaya mempunyai rasa nalar wajib menangkis bahaya untuk menjaga diri dan demikianlah juga boleh jadi kami karena terpaksa akan mengadakan perlawanan sekuat-kuatnya dan selama-lamanya dengan cara tenaga diam”.

Pemerintah Kolonial Belanda selanjutnya mengutus Kuasa Pemerintah Untuk Urusan Umum dalam Volksraad, Mr. Kiwiet de Jonge menemui Ki Hajar Dewantoro untuk mempersoalkan ordonansi tersebut. Sementara itu, Konperensi Taman Siswa memutuskan tetap menolak ordonansi dan kepada segenap cabangnya diwajibkan dengan cara *menyengkhah* dalam arti *mbeguguk ngutha waton (lijdelijk verzet)* dan cara-cara yang sesuai dengan azas Taman Siswa.

Dukungan terhadap sikap Taman Siswa datang dari perorangan maupun organisasi, seperti misalnya Muhammadiyah, Persatuan Bangsa Indonesia (PIB), Persyarikatan Ulama, Istri Sedar dan Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia, Partai Sarikat Islam Indonesia, Jong Islamieten Bond, Perguruan Rakyat, demikian pula pers nasional seperti Sedyadarma, Darmokondo, Utusan Indonesia, Pewarta Deli, Aksi, Suara Umum dan lain-lain pada pokoknya mendukung sepenuhnya aksi yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantoro.

Akhirnya, karena hebatnya reaksi masyarakat Indonesia pada tanggal 13 Pebruari 1933 keluar ordonansi baru yang isinya membatalkan *Onderwijs Ordonantie* 17 September 1932 No. 494. Ordonansi baru itu berlaku mulai 21 Pebruari 1933 (Subagijo, 1981: 41-42). Dengan kenyataan ini maka pihak kaum pergerakan, khususnya organisasi-organisasi guru di bawah prakarsa Ki Hajar Dewantoro memperoleh kemenangan. Dan sejak itu lembaga-lembaga pendidikan lebih berkembang

untuk mengobarkan semangat kebangsaan, walaupun tetap dalam pengawasan ketat Pemerintah Kolonial Belanda.

SIMPULAN

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di akhir abad XX, perjuangan bangsa Indonesia mempunyai bentuk yang berbeda dengan masa sebelumnya. Hal ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh kaum cerdik cendekiawan. Kaum cerdik cendekiawan merupakan hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Politik Etis. Kaum cerdik cendekiawan merupakan golongan masyarakat yang sadar akan nasib bangsanya, yang sebenarnya tidak dikehendaki keberadaannya oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain sebagai pemimpin pergerakan nasional, kaum cerdik cendekiawan juga berperan sebagai seorang guru, yang menyebarkan semangat nasionalisme melalui proses pembelajaran di kelas maupun tulisan-tulisan di surat kabar. Guru berperan mempercepat dan memperluas tersebarnya semangat nasionalisme ke segenap lapisan masyarakat, sehingga gerakan melawan kolonial Hindia Belanda menjadi gerakan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. 1992. *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta. Insist
- Hardi. 1983. *Api Nasionalisme Cuplikan Pengalaman*. Jakarta. Gunung Agung
- Hobsbawm, E.J. *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*. terjemahan oleh Hartian Silawati. Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yogya
- Kahin, George Mc Turnan. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta. UNS Press
- Kohn, Hans. 1984. *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*. Jakarta. PT. Pembangunan dan Penerbit Erlangga
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. Tiara Wacana
- Leirissa, R.Z. tt. *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. TP
- Marno, dan M. Idris. 2008. *Strategi dan Metode Pengajaran*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media
- Notosusanto, dkk. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta. Depdikbud. Balai Pustaka
- Oemar, Moh, dkk. 1978. *Sejarah Jawa Tengah*. Jakarta. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah
- Ricklefs, M.C. 2001. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta. PT. Serambi Ilmu Semesta
- Soebagijo, I.N. 1981. *Sudiro Perjuangan Tanpa Henti*. Jakarta. Gunung Agung
- Soeroto, Soeri, dkk. (Peny). 1991. *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta. LP3ES
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sunario. 1972. *Banteng Segitiga dan Indonesia Menggugat*. Jakarta. Yayasan Marinda
- Stoddard, Lothrop. 1966. *Dunia Baru Islam (The New Word of Islam)*. Jakarta. Perum Percetakan Negara
- Stoddard, Lothrop. 1966. "Pasang Naik Gerakan Nasional di Indonesia" dalam *Pasang Naik Kulit Berwarna (The Rising Tide of Color)* Jakarta. Perum Percetakan Negara
- Wasino. 2006. *Guru dan Integrasi Bangsa. Pidato Ilmiah pada Dies Natalis ke-41 UNNES*. Semarang. UNNES Press